

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

- A. Perkembangan Inflasi Kota Tanjungpinang Pada akhir Triwulan IV 2025 (Desember 2025), Kota Tanjungpinang mencatat inflasi *year-on-year* (y-on-y) sebesar 2,75 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,64. Capaian ini menunjukkan bahwa inflasi Kota Tanjungpinang berada pada tingkat yang terjaga dan sejalan dengan kondisi fundamental ekonomi daerah, serta tidak menunjukkan adanya tekanan harga yang berlebihan pada akhir tahun. Secara *year-to-date* (y-to-d), inflasi Kota Tanjungpinang hingga Desember 2025 juga tercatat sebesar 2,75 persen, yang mencerminkan bahwa akumulasi kenaikan harga sepanjang tahun berlangsung secara bertahap dan terkendali, tanpa lonjakan tajam pada periode tertentu. Kondisi ini mengindikasikan efektivitas upaya stabilisasi harga yang telah dilakukan sepanjang tahun berjalan. Dari sisi dinamika bulanan, pada Desember 2025 terjadi inflasi *month-to-month* (m-to-m) sebesar 1,28 persen. Kenaikan harga pada bulan penutup tahun ini dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat, faktor musiman akhir tahun, serta penyesuaian harga pada sejumlah komoditas dan jasa, yang secara umum masih berada dalam batas kewajaran. Secara keseluruhan, perkembangan inflasi hingga akhir Triwulan IV 2025 menunjukkan bahwa stabilitas harga di Kota Tanjungpinang tetap terpelihara, meskipun terdapat peningkatan tekanan harga bersifat temporer pada bulan Desember. Kondisi ini mencerminkan keseimbangan antara dinamika permintaan, pasokan, serta kebijakan pengendalian inflasi yang berjalan sepanjang tahun.
- B. Perkembangan Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa Inflasi y-on-y Desember 2025 terutama dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 4,97 persen dengan andil inflasi 1,4162 persen. Komoditas utama yang mendorong inflasi pada kelompok ini antara lain beras, cabai merah, cabai rawit, ikan segar, daging ayam ras, serta rokok kretek filter, yang mengalami kenaikan harga secara tahunan. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi tertinggi sebesar 15,82 persen dengan andil inflasi 0,9937 persen, terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga emas perhiasan serta komoditas perawatan pribadi dan jasa terkait. Kelompok transportasi mengalami inflasi y-on-y sebesar 3,36 persen dengan andil inflasi 0,4907 persen, yang dipicu oleh kenaikan tarif angkutan udara, biaya operasional transportasi, serta meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang akhir tahun. Kelompok pengeluaran lainnya yang turut mengalami inflasi meliputi kesehatan (1,38 persen), pendidikan (1,91 persen), serta perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,68 persen), meskipun kontribusinya relatif terbatas terhadap inflasi umum. Di sisi penahan inflasi, kelompok pakaian dan alas kaki mengalami deflasi y-on-y sebesar -8,95 persen, sementara kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga mencatat deflasi -0,21 persen, yang berperan dalam menahan laju inflasi Kota Tanjungpinang. Berdasarkan posisi akhir tahun 2025, inflasi Kota Tanjungpinang pada Triwulan IV berada pada tingkat yang terkendali dan berkesinambungan, dengan inflasi y-on-y dan y-to-d

sebesar 2,75 persen, meskipun terdapat tekanan harga musiman pada bulan Desember. Struktur inflasi menunjukkan bahwa inflasi Kota Tanjungpinang masih sangat dipengaruhi oleh komoditas pangan strategis serta komoditas non-pangan tertentu seperti emas perhiasan dan jasa transportasi, sehingga pengendalian inflasi ke depan perlu difokuskan pada aspek pasokan, distribusi, dan stabilisasi harga. Secara keseluruhan, capaian inflasi Triwulan IV 2025 menjadi indikator penting stabilitas ekonomi Kota Tanjungpinang pada akhir tahun, serta menjadi dasar yang kuat dalam perumusan kebijakan pengendalian inflasi pada periode triwulan berikutnya.

#### C. Risiko Inflasi Kota Tanjungpinang

Risiko Inflasi Kota Tanjungpinang yang perlu dicermati ke depan, diantaranya adalah:

- a. Risiko kenaikan harga pangan strategis masih menjadi perhatian utama, mengingat inflasi Kota Tanjungpinang pada Triwulan IV sangat dipengaruhi oleh komoditas seperti beras, cabai merah, cabai rawit, ikan segar, dan daging ayam ras. Ketergantungan pasokan dari daerah lain serta potensi gangguan distribusi akibat cuaca dan transportasi dapat memicu volatilitas harga pangan dalam jangka pendek.
- b. Risiko fluktuasi harga komoditas perawatan pribadi, khususnya emas perhiasan, perlu terus dicermati. Kontribusi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang cukup besar terhadap inflasi menunjukkan bahwa pergerakan harga emas global dan nilai tukar dapat dengan cepat memengaruhi inflasi Kota Tanjungpinang, meskipun berasal dari faktor eksternal.
- c. Risiko peningkatan biaya transportasi berpotensi kembali menekan inflasi, terutama terkait dengan tarif angkutan udara dan biaya logistik. Posisi geografis Kota Tanjungpinang sebagai wilayah kepulauan menjadikan biaya transportasi sangat sensitif terhadap perubahan harga energi, kebijakan tarif, serta kondisi cuaca.
- d. Risiko tekanan inflasi musiman perlu diantisipasi, khususnya pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan momen peningkatan mobilitas masyarakat. Pengalaman inflasi bulanan yang tinggi pada Desember menunjukkan bahwa lonjakan permintaan musiman masih menjadi faktor penting dalam dinamika harga di Kota Tanjungpinang.
- e. Risiko berkurangnya pasokan akibat faktor cuaca ekstrem juga perlu mendapat perhatian, terutama terhadap komoditas ikan dan hasil hortikultura. Perubahan pola cuaca dapat mengganggu aktivitas nelayan dan distribusi pangan, sehingga berpotensi memicu kenaikan harga secara cepat.
- f. Risiko penyesuaian harga jasa bersifat struktural, seperti jasa transportasi, jasa perawatan pribadi, dan layanan lainnya, dapat menjadi sumber inflasi yang lebih persisten apabila tidak diimbangi dengan peningkatan efisiensi dan pengawasan harga.
- g. Risiko ekspektasi inflasi masyarakat perlu dikelola dengan baik. Kenaikan harga yang terjadi berulang pada komoditas tertentu dapat membentuk ekspektasi inflasi yang lebih tinggi, sehingga berpotensi mendorong perilaku penyesuaian

harga lanjutan di tingkat pedagang dan penyedia jasa.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Triwulan IV 2025, terdapat beberapa permasalahan dalam pengendalian inflasi di Kota Tanjungpinang, yaitu sebagai berikut:

- a. Kontribusi Pertanian Kota Tanjungpinang Hanya 1-5% terhadap kebutuhan pokok. Produksi pertanian Kota Tanjungpinang hanya berkisar 1-5% untuk mencukupi konsumsi kebutuhan pokok sehingga pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Kota Tanjungpinang sebagian besar didatangkan dari luar daerah dan daerah di sekitar Kota Tanjungpinang. Komoditas cabai dan sayur-sayuran didatangkan dari Medan, Batam dan Jawa sehingga sangat tergantung dari suplai daerah penghasil tersebut. Ketergantungan ini menjadi masalah yang cukup signifikan mengingat pada Triwulan IV harga aneka cabai mengalami peningkatan khususnya cabai merah diakibatkan disebabkan oleh kondisi pasokan cabai yang dibawa dengan angkutan udara sehingga terjadi kenaikan biaya distribusi, disertai dengan kurangnya jumlah produksi lokal dan pasokan dari Sentra Produsen, serta anomali cuaca yang menyebabkan banyak daerah Sentra produsen mengalami gagal panen.
- b. Kontribusi peternakan Kota Tanjungpinang hanya 5-10% terhadap kebutuhan pangan. Komoditas daging ayam ras menjadi salah satu komoditas *volatile food* yang berpengaruh terhadap inflasi di Kota Tanjungpinang. Tanjungpinang hanya memiliki 5 Peternak lokal, 3 peternak sudah melakukan mitra dengan PT. Japfa, 1 Peternak bermitra dengan PT. Charoen Pokphan dan 1 peternak mandiri. Saat ini hanya peternak mandiri yang mensupply produksi ayam hidup untuk Kota Tanjungpinang dengan perkiraan rata-rata 16.520 Ekor/perbulan, sementara kebutuhan pemotongan ayam mencapai 154.128 ekor/perbulan. Untuk mencukupi pasokan komoditas ini, Kota Tanjungpinang memperoleh supply ayam dari luar daerah yaitu Kabupaten Bintan.
- c. Mahalnya biaya logistik/pengiriman barang dari luar daerah. Tanjungpinang merupakan daerah kepulauan yang tidak memiliki wilayah untuk pertanian dan hanya bergantung pada pasokan dari luar daerah. Distribusi barang kebutuhan pokok dan komoditas lainnya melalui jalur laut dan jalur udara. Kenaikan tarif angkutan udara mendorong kenaikan harga barang-barang di pasar sedangkan melalui jalur laut pengiriman komoditas masih menggunakan kapal **ro-ro** yang kapasitas dan kecepatannya terbatas. Sehingga menyebabkan pengiriman komoditas terutama pangan menjadi kurang efisien dari sisi biaya dan waktu.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kebijakan Pengendalian Inflasi yang diterapkan pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Menjaga Keterjangkauan dan Stabilitas Harga

Pemantauan harga dan stok bahan kebutuhan pokok rutin 2 (dua) kali seminggu oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang dan melakukan pemantauan 21 bahan pangan setiap harinya di 2 (dua) pasar kota tanjungpinang oleh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan.

- b. Melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga agar ketika terjadi gejolak harga di pasar dengan konsep harga dibawah harga pasar, menghindari kelangkaan ketersediaan pasokan bahan pangan dan langsung menyasar kepada masyarakat karena dilaksanakan di kawasan padat pemukiman.
- c. TPID Kota Tanjungpinang memiliki Gerai Pangan sebagai sarana untuk memasarkan hasil petani dan peternak lokal. Gerai pangan berperan sebagai Operasi Pasar yang dilakukan setiap hari, karena distribusi langsung dari produsen ke konsumen sehingga masyarakat dapat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah sekitar 5-15% dibanding pasar induk. Saat ini terdapat 35 petani yang berjualan di Gerai Pangan.

#### Menjaga Ketersediaan dan Stabilitas Pasokan Bahan Pangan

- a. Menjaga ketersediaan Pasokan lokal dengan memperkuat produksi lokal. Peningkatan Produksi lokal ini dilakukan melalui kegiatan (1) Bantuan Sarana Produksi (SAPRODI) berupa benih, pupuk, alsintan, pakan, dll kepada kelompok yang sudah terdaftar di aplikasi resmi. (2) Penyuluhan Lapangan yang dilakukan pra hingga pasca panen, penerapan SOP dan GAP (*good agricultural practices*), penguatan kelompok dan pembukuan. Saat ini terdapat 24 Kelompok tani yang berada dibawah binaan DP3. (3) PEMASARAN dengan membantu kelompok binaan dalam pemasaran hasil produksi baik langsung atau bergabung di gerai pangan. (4) Gerakan Menanam khususnya untuk komoditas cabai dengan melaksanakan pembinaan dan sosialisasi gerakan menanam cabai ke seluruh lapisan masyarakat berupa *urban farming*, *office farming* dan *shcool farming*.
- b. Melakukan pengadaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). DP3 menyiapkan CPPD berupa Komoditas Beras yang telah dilaksanakan dari Tahun 2020 hingga 2025 dan di atur dalam Peraturan Wali Kota Tanjungpinang.
- c. Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang memanfaatkan lahan pekarangan dan lahan tidak terurus untuk produksi pangan sebagai wujud nyata dalam memastikan ketersediaan pangan keluarga dan intervensi langsung terhadap penanganan Stunting. Selain mendekatkan bahan pangan ke dapur, P2L juga mendukung variasi ketersediaan pangan karena selain untuk pertanian, P2L juga bisa untuk budidaya ikan dan ternak kecil.
- d. Program Prognosa dan Neraca Bahan Makanan untuk menyediakan data Ketersedian Pangan di Kota Tanjungpinang. Prognosa Neraca Pangan bertujuan untuk memperkirakan ketersediaan, kebutuhan dan surplus/defisit komoditas pangan pada periode tertentu. Sementara Neraca Bahan Makanan merupakan instrumen untuk menganalisis situasi ketersediaan dan kebutuhan pangan dalam kurun waktu tertentu berdasarkan aspek penyediaan dan pemanfaatan pangan.

a.

## Menjaga Kelancaran Distribusi

Melakukan pemantauan ketersediaan pangan di tingkat produsen, distributor, dan pasar secara reguler pekanan (mingguan) dan insidentil pada waktu-waktu tertentu seperti menjelang hbkn sehingga ketersediaan pasokan Kota Tanjungpinang tetap terjaga.

## Komunikasi Efektif

- a. Melakukan rapat koordinasi Rutin Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Tanjungpinang secara rutin setiap bulannya.
  - b. Mengikuti Rapat Koordinasi Nasional dalam rangka pengendalian Inflasi di daerah dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia setiap minggu.
  - c. Melaksanakan rapat koordinasi dengan mengundang para *stakeholders* dan pelaku usaha ekonomi untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran pasokan barang komoditas pangan menjelang HBKN.
  - d. Menginformasikan ketersediaan pasokan dan harga secara berkala untuk menjaga ekspektasi inflasi di masyarakat serta melakukan dialog interaktif & menghimbau masyarakat untuk belanja bijak.
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kota Tanjungpinang pada Triwulan IV Tahun 2025, antara lain:

## Keterjangkauan Harga

- a. Penyesuaian pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan/atau Operasi Pasar dengan kondisi harga kebutuhan pangan yang sedang tinggi/mengalami tren kenaikan harga.
- b. Peran Gerai Pangan dalam upaya stabilisasi harga belum berjalan secara maksimal, hal ini dikarenakan lokasi Gerai Pangan yang relatif jauh dari pasar induk sehingga belum mempengaruhi harga secara signifikan.

## Ketersediaan Pasokan

- a. Peningkatan pemanfaatan Alsintan dan Saprodi pertanian dan perikanan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan.
- b. Peningkatan Pelaksanaan gerakan budidaya pangan mandiri sebagai upaya K3 penguatan ketahanan pangan strategis melalui bantuan teknis pelatihan dan pemberian bantuan bibit.

## Kelancaran Distribusi

Penguatan koordinasi melalui rapat-rapat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta dalam hal kelancaran distribusi barang. Pemerintah daerah melalui perangkat daerah teknis secara rutin melakukan

pengawasan dan monitoring barang kebutuhan pokok baik yang berada di pasar modern maupun pasar tradisional.

### Komunikasi Efektif

Rapat koordinasi Rutin Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Tanjungpinang telah dilaksanakan secara rutin setiap bulannya. Selama Triwulan IV ini, rapat koordinasi di pimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang.

#### 5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kota Tanjungpinang pada Triwulan IV tahun 2025, adalah sebagai berikut:

### **Keterjangkauan Harga**

#### ◦ **Rekomendasi**

Menjaga keterjangkauan harga komoditas pangan strategis, khususnya komoditas yang mengalami harga tinggi dan fluktuasi signifikan seperti cabai, bawang merah, dan daging ayam karkas, melalui intervensi harga yang selektif dan terukur.

#### ◦ **Tindak Lanjut**

Melaksanakan operasi pasar terbatas pada komoditas bergejolak, mengoptimalkan pemanfaatan stok penyangga, serta melakukan pemantauan harga harian untuk memastikan harga tetap berada dalam batas yang wajar dan terjangkau oleh masyarakat.

### **Ketersediaan Pasokan**

#### ◦ **Rekomendasi**

Memastikan kecukupan pasokan komoditas pangan strategis dengan memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, sentra produksi, dan pelaku usaha, khususnya untuk komoditas hortikultura dan protein hewani yang sensitif terhadap gangguan pasokan.

#### ◦ **Tindak Lanjut**

Menyusun proyeksi kebutuhan dan pasokan jangka pendek, memperkuat cadangan pangan daerah, serta melakukan fasilitasi pasokan dari daerah surplus pada saat terjadi potensi kekurangan pasokan.

### **Kelancaran Distribusi**

#### ◦ **Rekomendasi**

Menjaga kelancaran distribusi pangan guna meminimalkan disparitas harga antar wilayah dan mencegah terjadinya penumpukan pasokan di satu wilayah tertentu.

- **Tindak Lanjut**

Mengidentifikasi dan mengantisipasi hambatan distribusi, memperkuat kerja sama antar daerah, serta mendorong efisiensi rantai distribusi untuk menekan biaya logistik yang berdampak pada harga di tingkat konsumen.

## **Komunikasi Efektif**

- **Rekomendasi**

Memperkuat komunikasi publik yang transparan dan konsisten terkait perkembangan harga, ketersediaan pasokan, serta langkah-langkah pengendalian yang dilakukan pemerintah daerah.

- **Tindak Lanjut**

Menyampaikan informasi harga dan kondisi pasokan secara berkala melalui kanal resmi, meningkatkan koordinasi komunikasi antar perangkat daerah, serta melakukan edukasi kepada masyarakat untuk mengelola ekspektasi dan mencegah kepanikan pasar.